



► AKSES KESEHATAN

Belum Semua Puskesmas Sediakan Obat HIV/AIDS

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

JOGJA—Belum semua puskesmas di DIY menyediakan obat Antiretroviral (ARV) bagi pengidap HIV/AIDS atau orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY, Setyarini Hestu Lestari, menyebut hanya penyediaan akses obat Antiretroviral (ARV) yang belum ada di seluruh puskesmas.

"Targetnya tahun depan ARV



sudah bisa diakses di seluruh puskesmas, karena sifat obatnya memang rujukan jadi yang sudah ada kewenangan yang bisa memberikan," jelasnya, Rabu (30/11).

Setyarini menjelaskan untuk tempat lokalisasi di DIY yang rutin dicek dan diperiksa yakni di Pasar Kembang, Jogja dan Parangkusumo, Bantul. "Petugas yang memeriksa dari puskesmas setempat," ujarnya.

Ia menambahkan ODHA di DIY sudah mendapatkan layanan kesehatan dengan mencukupi.

► Halaman 11

Belum Semua...

Upaya pencegahan jadi langkah utama Dinkes DIY untuk mewujudkan target 2030 DIY nol kasus baru HIV/AIDS.

Berdasarkan data Dinkes DIY per September 2022 ada 6.214 kasus HIV (virus baru masuk ke tubuh), sedangkan kasus AIDS (virus sudah menyerang kekebalan tubuh) mencapai 1.966 kasus. Wiraswasta mendominasi kasus HIV dengan jumlah 932 orang, disusul ibu rumah tangga dengan 682 orang. Data tersebut dihitung sejak kasus HIV muncul pertama kali di DIY pada 1993.

Rentang usia yang paling banyak mengidap pada kategori umur 20-19 tahun sebanyak 2.005 orang, lalu umur 30-39 tahun ada 1.860, kemudian umur 40-49 tahun terdapat 1.043 orang. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga ditemukan mengidapnya. Bayi dengan usia di bawah satu tahun ada 40 kasus, sedangkan anak usia satu sampai lima tahun ada 85 anak.

Berbagai upaya pencegahan, penanganan, hingga perawatan dilakukan Dinkes DIY. Mulai dari pengecekan rutin di tempat lokalisasi yang paling rentan jadi lokasi penyebaran, edukasi ke sekolah-sekolah, hingga perluasan akses pengecekan HIV/AIDS yang sudah ada di seluruh puskesmas di DIY.

Setyarini menegaskan untuk saat ini tidak ada petugas kesehatan yang mendiskriminasi ODHA. "Ada standar pelayanan dan kode etik profesi kesehatan yang memang melarang tenaga medis mendiskriminasi, jadi pelayanan kami ramah terhadap ODHA," katanya.

Ke depannya layanan untuk ODHA, lanjut Setyarini, akan makin komprehensif melalui Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan HIV/AIDS. "Masih digodok di DPRD DIY, kami juga menunggu agar segera bisa mengimplementasikan," ucapnya.

Dalam raperda tersebut, pelayanan ODHA akan lebih mengikuti perkembangan medis dan menggandeng berbagai pihak. "Pengobatan HIV/AIDS terus berkembang, kami juga harus menyesuaikan makanya lewat raperda itu harapannya ada landasan

hukum yang jelas untuk mengikuti perkembangan, agar makin maksimal pelayannya," jelasnya.

Setyarini menyebut dalam raperda tersebut tak hanya Dinkes DIY yang punya kewenangan, tapi berbagai lembaga pemerintah juga akan diberikan tanggung jawab. "Misalnya Disnakertrans diberi kewenangan agar memastikan ODHA tidak mendapat diskriminasi di industri, lalu Dinas Pendidikan memastikan akses pendidikan yang layak bagi ODHA juga," katanya.

Diskriminasi dan stigmatisasi, jelas Setyarini, jadi tantangan penanganan HIV/AIDS. "Karena diskriminasi bikin ODHA sulit mengakses layanan yang ada, padahal itu hak mereka," katanya.

Kesehatan Reproduksi

Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, Budhi Hermanto, menyatakan hal senada. "Layanan kesehatan yang kami temui sudah tidak diskriminasi di DIY, cuma kadang masyarakat yang mendiskriminasi," katanya, Rabu siang.

Budhi menyebut tantangan lain penanganan HIV/AIDS adalah pendidikan kesehatan reproduksi. "Masih banyak yang menganggap tabu, padahal ini penting sebagai upaya preventif, kelompok remaja punya peran penting untuk memutus penularan HIV/AIDS makanya juga perlu didekati di edukasi yang komprehensif untuk menghindari perilaku seks berisiko," jelasnya.

PKBI DIY, jelas Budhi, memiliki jejaring remaja yang sudah melekat kesehatan reproduksi. "Dari sana kami ajak remaja agar memahami pentingnya kesehatan reproduksi, terutama untuk menghindari HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya," ujarnya.

Kelompok paling rentan yang perlu diperhatikan, jelas Budhi, adalah pekerja seks yang tidak mukim tetap.

Budhi menyebut kawasan prostitusi di DIY sudah rutin pemeriksaan HIV/AIDS. "Program ini patut terus dipertahankan, dan tentunya ditingkatkan ke yang pekerja seks online," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005